

Analisis Kausalitas Penerimaan Pajak, Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia

Ibrahim Wira Sanjaya¹, Ali Anis²

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Wirasanjaya001@gmail.com, alianis2911@yahoo.com

Info Artikel

Diterima:

18 November 2021

Disetujui:

25 November 2021

Terbit daring:

01 Desember 2021

DOI: -

Sitasi:

Sanjaya, I, W, & Anis, A (2021). Analisis Kausalitas Penerimaan Pajak, Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *JKEP: Jurnal kajian ekonomi dan pembangunan*, 3(4)

Abstract

This study aims to analyze the causality between tax revenue, government expenditure and economic growth . This type of study is descriptive and associative. This study uses panel data from 1970-2019 covering 33 provinces in Indonesia. This study uses the PVAR analysis method and uses Granger Causality Test for causality test with tax revenue, government expenditure and economic growth as independent variables. The results of this study indicate that: (1) There is a one-way causality of the tax revenue variable on the government expenditure variable; (2) there is a one-way causality from the economic growth variable to the government expenditure variable; (3) There is no causality between the tax revenue variable and the economic growth variable.

Keywords: Tax Revenue, Governmnet Expenditure, Economic Growth, Granger Causality Test.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausalitas antara penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan asosiatif, penelitian ini menggunakan data *panel* dari tahun 2013 sampai 2019 yang mencakup 33 provinsi di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan model *Panel Vector Autoregression (PVAR)* dan uji kausalitas menggunakan *Granger Causality Test* dengan penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independent Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa: (1) terdapat kausalitas satu arah dari variabel penerimaan pajak kepada variabel pengeluaran pemerintah; (2) terdapat kausalitas satu arah dari variabel pertumbuhan ekonomi kepada variabel pengeluaran pemerintah; (3) Tidak terdapat hubungan kausalitas antara variabel penerimaan pajak dan variabel pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci : Penerimaan Pajak, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, *Granger Causality Test*.

Kode Klasifikasi JEL: H50, F24

PENDAHULUAN

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan utama negara berkembang agar bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Indonesia termasuk kedalam kategori negara berkembang yang berdasarkan publikasi *World Bank* pada tahun 2019 Indonesia termasuk kedalam kategori negara dengan pendapatan menengah ke atas (*upper middle income country*) dengan GNI per kapita sebesar 4,050 USD di atas batas bawah yang ditetapkan *World Bank* yaitu sebesar 4,046 USD. Salah satu masalah utama yang harus dihindari oleh perekonomian Indonesia adalah *middle income trap* yang membuat perekonomian akan sulit tumbuh dan usaha dalam mencapai status negara berpendapatan tinggi akan menjadi terhambat. Salah satu cara yang dapat ditempuh pemerintah untuk keluar dari *middle income trap* dengan mengoptimalkan kebijakan fiskal. Jhingan (2016) menjelaskan bahwa adanya kebijakan fiskal di negara berkembang memiliki arti penting dalam menghadapi permasalahan pembentukan modal yaitu pendapatan dan tabungan per

kapita negara sangat rendah. Orang dengan pendapatan tinggi justru mengkonsumsi barang mewah dan menyalurkan pada hal yang tidak produktif dengan demikian dibutuhkan kebijakan fiskal agar mengalihkan semua ke jalur yang lebih produktif yang dalam hal ini pajak memiliki peranan penting sehingga dapat membatasi konsumsi swasta dan difokuskan untuk pembentukan modal pemerintah. Modal yang diperoleh dari penarikan pajak akan disalurkan untuk membiayai program pembangunan ekonomi dan investasi publik yang lebih baik. Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan adanya hubungan kausalitas penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal.

Dalam kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah juga memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi dimana pemerintah akan meningkatkan pengeluaran pemerintah melalui pembangunan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi sedangkan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pengeluaran pemerintah guna menjalankan kebijakan pendukung pertumbuhan ekonomi. Jhingan (2016) menyatakan bahwa pada negara berkembang terdapat perbedaan kesejahteraan dan pendapatan yang tinggi karena itu dibutuhkan pengeluaran pemerintah untuk menurunkan perbedaan yang ada. Pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan dan pendidikan akan membantu dalam meningkatkan sumber daya manusia sehingga memberikan peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan daya beli sehingga menurunkan ketimpangan pendapatan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah menjadi fokus utama dan memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Berikut laju pertumbuhan PDRB provinsi di Indonesia tahun 2011-2020:



Gambar 1.1: Rata – Rata Pertumbuhan PDRB Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2020

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah), 2021

Dari gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi dalam laju pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi seluruh Indonesia, dalam kurun waktu sepuluh tahun terlihat bahwa terjadi penurunan secara bertahap dari tahun 2012 sampai tahun 2015 sebesar 1,17%. Melambatnya pertumbuhan ekonomi pada periode 2013 – 2015 disebabkan oleh dua hal yaitu adanya perubahan kebijakan moneter Amerika Serikat yang salah satunya menurunkan tingkat suku bunga yang memberikan guncangan kepada negara *Emerging Market* yang menyebabkan *capital outflow* yang cukup besar dan jatuhnya harga komoditas perkebunan dan pertambangan dimana sebagian besar pertumbuhan ekonomi Indonesia berasal dari ekspor komoditi perkebunan dan pertambangan. Namun pertumbuhan ekonomi mulai membaik secara bertahap pada kurun waktu tahun 2016 sampai pada tahun 2018 sebesar 0,43% sebelum menurun di tahun 2019 sampai tahun 2020 sebesar 3,41%. Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 terjadi akibat berbagai indikator yang salah satunya adalah ekonomi global yang meliputi keadaan perang dagang antara AS-China, tensi geopolitik Timur Tengah dan fluktuasi harga komoditas. Sedangkan terjadinya penurunan

pada tahun 2020 diakibatkan pandemi Covid-19 yang memberikan dampak negatif di seluruh perekonomian dunia, tidak terkecuali Indonesia dan membawa kontraksi yang sangat buruk dimana terjadi pertumbuhan negatif di seluruh komponen kecuali pengeluaran pemerintah.

Hubungan kausalitas penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi dijelaskan oleh Maganya (2020) bahwa pemerintah harus lebih memperhatikan struktur pajak agar dapat lebih efisien sehingga mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dan dalam hal ini masyarakat harus membayar kepada pemerintah dalam bentuk pajak atas berbagai manfaat yang diterima dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan penelitiannya menunjukkan terdapat hubungan kausalitas dua arah antara penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi di Tanzania.

TINJAUAN LITERATUR

1. Penerimaan Pajak

Teori yang dikemukakan Peacock dan Wiseman (1961) tentang hubungan penerimaan pajak dari masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah yang mendasari dengan pandangan bahwa masyarakat memiliki tingkat toleransi pajak, yaitu tingkat dimana masyarakat memahami bahwa besarnya pemungutan pajak dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah oleh karena itu menurut mereka adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pajak sebagai penerimaan pemerintah sehingga meningkatkan pengeluaran pemerintah, sehingga masyarakat memiliki kesadaran bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas dan menyebabkan masyarakat mempunyai suatu tingkat kesediaan untuk membayar pajak (Mangkoesebroto, 2001).

Sedangkan menurut Sudirman (2011) menyatakan bahwa pajak dalam kebijakan fiskal menjadi penting karena penetapan pajak dalam jumlah tertentu pada wajib pajak akan menyebabkan peningkatan pendapatan pemerintah sehingga pemerintah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat adalah karena meningkatnya produksi nasional yang didorong oleh pemerintah.

2. Pengeluaran Pemerintah

Dalam cakupan makro, Rostow dan Musgrave mengembangkan model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang menghubungkan pengeluaran pemerintah menjadi tiga tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Dimana pada tahap awal, untuk memajukan perekonomian membutuhkan investasi besar sehingga pemerintah mengambil peran penyedia prasarana seperti kesehatan, pendidikan transportasi dan sebagainya. Tahap menengah, pada tahap ini peran investasi dari pemerintah masih dibutuhkan agar memudahkan perekonomian mencapai tahap tinggal landas, namun pada tahap ini peran investasi swasta sudah membesar sehingga menimbulkan kegagalan pasar yang menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dengan kualitas yang lebih baik dan dalam jumlah yang lebih banyak. Tahap lanjut, pada tahap ini peran pemerintah beralih dari penyedia prasarana ke pengeluaran untuk kegiatan sosial seperti program pelayanan kesehatan, program jaminan pendidikan dan kesejahteraan hari tua (Mangkoesebroto, 2001).

3. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut pendapat Adolf Wagner menjelaskan hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah yakni mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19. Secara relatif, pengeluaran pemerintah dijelaskan dalam hukum Wagner adalah dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hasilnya terbukti menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian mengalami kecenderungan yang semakin meningkat. Kecenderungan ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah (*law of ever increasing state activity*) (Mangkoesebroto, 2001).

Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{P_K PP_1}{PPK_1} < \frac{P_K PP_2}{PPK_2} < \dots < \frac{P_K PP_n}{PPK_n}$$

$P_K PP$: Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK : pendapatan per kapita atau GDP/jumlah penduduk

1,2,...,n : Jangka waktu (tahun)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis secara deskriptif dan asosiatif menggunakan model panel vector autoregression (VAR), variabel independent yang meliputi penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi di 33 provinsi di Indonesia, rentang waktu penelitian dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh secara dokumentasi dari dan lembaga resmi yaitu Badan Statistik Indonesia (BPS).

Model yang digunakan dalam persamaan panel VAR sebagai berikut :

$$PPJK_{it} = \alpha_{10} + \sum_{k=1}^p \alpha_{11} PPJK_{i,t-k} + \sum_{k=1}^p \alpha_{12} PP_{i,t-k} + \sum_{k=1}^p \alpha_{13} PE_{i,t-k} + n_{i,t-k} + \mu_{it} \quad (1)$$

$$PP_{it} = \alpha_{20} + \sum_{k=1}^p \alpha_{21} PPJK_{i,t-k} + \sum_{k=1}^p \alpha_{22} PP_{i,t-k} + \sum_{k=1}^p \alpha_{23} PE_{i,t-k} + n_{i,t-k} + \mu_{it} \quad (2)$$

$$PE_{it} = \alpha_{30} + \sum_{k=1}^p \alpha_{31} PPJK_{i,t-k} + \sum_{k=1}^p \alpha_{32} PP_{i,t-k} + \sum_{k=1}^p \alpha_{33} PE_{i,t-k} + n_{i,t-k} + \mu_{it} \quad (3)$$

Dimana :

$PPJK_{it}$ = Penerimaan pajak

PP_{it} = Pengeluaran pemerintah

PE_{it} = Pertumbuhan ekonomi

i = Provinsi

t = Tahun

μ = Error term

α = Konstanta

Definisi Operasional dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak (Y_1), merupakan sejumlah dana yang diterima pemerintah daerah provinsi di seluruh Indonesia melalui penetapan kebijakan perpajakan yang diukur melalui penerimaan pajak daerah dan dinyatakan dalam satuan rupiah.
2. Pengeluaran Pemerintah (Y_2), merupakan sejumlah dana yang dikeluarkan pemerintah provinsi di seluruh Indonesia dalam menjalankan kinerja dan fungsi yang diukur dalam satuan rupiah.
3. Pertumbuhan Ekonomi (Y_3), Merupakan persentase peningkatan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor ekonomi dari seluruh provinsi di Indonesia yang diukur melalui produk domestik regional bruto (PDRB) atas harga konstan yang dinyatakan dalam satuan persen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Akar Unit (Unit Root Test)

Uji akar unit bertujuan untuk melihat apakah data penelitian ini terdapat unit root atau tidak agar dapat ditentukan stasioneritas suatu variabel penelitian. Pada data panel, uji akar unit menggunakan uji Levin, Lin & Chu dimana data variabel dikatakan stasioner jika nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Tahap pertama pengujian data di tingkat level, apabila tidak stasioner atau terdapat unit root pada tingkat level maka dilanjutkan ke tingkat first different atau second different. Berikut hasil olahan data dari variabel penelitian.

Tabel 1.2: Hasil Uji Akar Unit Variabel Penerimaan Pajak Pada Tingkat Level

Series: LNY1

Method	Statistic	Prob.*
		*

	-	
	15.700	0.000
Levin, Lin & Chu t*	7	0

** Probabilities are computed assuming asymptotic normality

Sumber : Olahan Data Eviews 9, 2021

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa data variabel penerimaan pajak dengan pengukuran menggunakan realisasi penerimaan pajak daerah, stasioner pada tingkat level yang dibuktikan dengan nilai probabilitas Levin, Lin & Chu t* yang lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Dimana nilai probabilitas sebesar $0.0000 < 0,05$.

Tabel 1.3: Hasil Uji Akar Unit Variabel Pengeluaran Pemerintah Pada Tingkat Level

Series: LNY2

Method	Statistic	Prob.*
	-	
Levin, Lin & Chu t*	7.6499	0.000
	1	0

** Probabilities are computed assuming asymptotic normality

Sumber : Olahan Data Eviews 9, 2021

Dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa data variabel pengeluaran pemerintah dengan pengukuran menggunakan realisasi pengeluaran pemerintah daerah, stasioner pada tingkat level yang dibuktikan dengan nilai probabilitas Levin, Lin & Chu t* yang lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Dimana nilai probabilitas sebesar $0.0000 < 0,05$.

Tabel 1.4: Hasil Uji Akar Unit Variabel Pertumbuhan Ekonomi Pada Tingkat Level

Series: Y3

Method	Statistic	Prob.*
	-	
Levin, Lin & Chu t*	21.476	0.000
	7	0

** Probabilities are computed assuming asymptotic normality

Sumber : Olahan Data Eviews 9, 2021

Dari tabel 1.4 dapat dilihat bahwa data variabel pertumbuhan ekonomi dengan pengukuran menggunakan laju pertumbuhan PDRB, stasioner pada tingkat level yang dibuktikan dengan nilai probabilitas Levin, Lin & Chu t* yang lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Dimana nilai probabilitas sebesar $0.0000 < 0,05$.

2. Uji Kointegrasi (*Panel Kointegration Test*)

Uji kointegrasi bertujuan untuk melihat apakah data dari variabel yang diteliti terdapat atau tidak keseimbangan jangka panjang. Jika data dari variabel yang diteliti tidak terkointegrasi maka dapat dilanjutkan dengan model PVAR, namun jika data

terkointegrasi maka harus dilanjutkan dengan model PVECM. Pada data panel, uji kointegrasi menggunakan uji Kao dimana data variabel dikatakan terkointegrasi jika besar dari nilai signifikan 0,05.

Tabel 1.5: Hasil Uji Kointegrasi Variabel Penerimaan Pajak, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi

Series: LNY1 LNY2 Y3

	t-Statistic	Prob.
ADF	-6.655565	0.0000
Residual variance	0.011108	
HAC variance	0.007754	

Sumber : Olahan Data Eviews 9, 2021

Pada tabel 1.5 dapat dilihat bahwa hasil dari uji kointegrasi ketiga variabel menunjukkan nilai probabilitas dari ADF sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari nilai signifikan 0,05 sehingga data dari ketiga variabel yang diteliti tidak terkointegrasi.

3. Pemilihan Lag Optimum

Pemilihan lag optimum berguna untuk menentukan jumlah lag yang digunakan dalam penilitan guna mendukung uji kausalitas granger dan estimasi PVAR agar memperoleh hasil yang baik. Pemilihan lag optimum ditentukan oleh kriteria informasi yang direkomendasikan *Final Prediction Error* (FPE), *Akaike Information Criterion* (AIC), *Schwarz Criterion* (SC), dan *Hunnan-Quinn* (HQ) dimana informasi lag ditunjukkan oleh tanda bintang dan lag yang digunakan adalah lag dengan tanda bintang(*) terbanyak.

Tabel 1.6: Hasil Uji Lag Optimum

VAR Lag Order Selection Criteria

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-598.8564	NA	1.831996	9.119036	9.184555	9.145660
1	-29.53189	1104.145	0.000377	0.629271	0.891344*	0.735765*
2	-24.06890	10.34656	0.000397	0.682862	1.141490	0.869227
3	-8.272062	29.20022*	0.000359*	0.579880*	1.235062	0.846116

Sumber : Olahan Data Eviews 9, 2021

Berdasarkan tabel 1.6 dapat dilihat bahwa tanda (*) paling banyak terdapat pada Lag 3 dan Akaike Information Criterion (AIC) menunjukkan tanda (*) pada Lag 3 dengan nilai terkecil sebesar 0.579880. Maka dapat disimpulkan bahwa lag 3 merupakan yang terbaik untuk digunakan dalam penelitian.

4. Uji Kausalitas Granger

Uji kausalitas granger bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan sebab akibat atau kausalitas dari variabel yang diteliti. Hasil uji kausalitas granger bisa menunjukkan hubungan kausalitas satu arah dari satu variabel penelitian kepada variabel lainnya atau menunjukkan hubungan kausalitas dua arah antar variabel penelitian. Dalam melakukan uji kausalitas granger harus menggunakan lag optimum yang sudah ditentukan pada tahap sebelumnya, jadi uji kausalitas granger dalam penelitian ini menggunakan lag ke 3.

Tabel 1.7: Hasil Uji Kausalitas Granger

Pairwise Granger Causality Tests

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
LN _{Y2} does not Granger Cause LN _{Y1}	132	2.22999	0.0880
LN _{Y1} does not Granger Cause LN _{Y2}		2.89650	0.0378
Y ₃ does not Granger Cause LN _{Y1}	132	0.24401	0.8655
LN _{Y1} does not Granger Cause Y ₃		0.34761	0.7909
Y ₃ does not Granger Cause LN _{Y2}	132	3.10239	0.0291
LN _{Y2} does not Granger Cause Y ₃		0.67540	0.5687

Sumber : Olahan Data Eviews 9, 2021

Pada tabel 1.7 menunjukkan hasil uji kausalitas granger yang menjelaskan:

1. Output uji kausalitas granger menunjukkan tidak terdapat hubungan kausalitas dua arah antara variabel penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah dikarenakan nilai probabilitas dari kedua variabel sebesar $0.0880 > 0.05$ dan $0.0378 < 0.05$. Dari hasil ini hanya menunjukkan terdapat hubungan kausalitas satu arah dari variabel penerimaan pajak kepada pengeluaran pemerintah dengan nilai probabilitas sebesar $0.0378 < 0.05$.
2. Output uji kausalitas granger menunjukkan tidak terdapat hubungan kausalitas dua arah atau satu arah antara variabel penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi dikarenakan nilai probabilitas dari kedua variabel sebesar $0.8655 > 0.05$ dan $0.7909 > 0.05$.
3. Output uji kausalitas granger menunjukkan tidak terdapat hubungan kausalitas dua arah antara variabel pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dikarenakan nilai probabilitas dari kedua variabel sebesar $0.0291 < 0.05$ dan $0.5687 > 0.05$. Dari hasil ini hanya menunjukkan terdapat hubungan kausalitas satu arah dari variabel pertumbuhan ekonomi kepada pengeluaran pemerintah dengan nilai probabilitas sebesar $0.0291 < 0.05$.

Berdasarkan hasil analisis data di atas, maka didapat pembahasan sebagai berikut:

4.1 Kausalitas antara Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah

Berdasarkan hasil uji kausalitas granger menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas antara penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah. Hal ini diketahui dari nilai probabilitas masing-masing variabel sebesar ($0.0880 > 0.05$) dan ($0.0378 < 0.05$). Maka didapat hasil bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga hipotesis yang diajukan pada penelitian ini ditolak dengan $\alpha = 0,05$ bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas antara penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah. Hal ini berarti bahwa selama periode penelitian tinggi atau rendahnya penerimaan pajak mempengaruhi pengeluaran pemerintah di Indonesia dan sebaliknya pengeluaran pemerintah tidak mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elvianti (2017) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat kausalitas antara penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah di Indonesia dalam kurun waktu dari tahun 2000 sampai 2015. Dimana hanya terdapat hubungan satu arah penerimaan pajak dengan pengeluaran pemerintah. Kondisi ini mungkin ada kaitannya dengan kebijakan fiskal ekspansif yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir ini memperlihatkan peningkatan pengeluaran pemerintah yang cukup signifikan yaitu dengan nilai rata-rata sebesar 11 persen. Namun pada sisi lain peningkatan pengeluaran pemerintah tidak diikuti oleh

peningkatan penerimaan pajak. Hal ini dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Sriyana (2009) yang menunjukkan hasil bahwa pada jangka pendek terdapat kausalitas satu arah dari penerimaan pajak kepada pengeluaran pemerintah di Indonesia. Dimana pemerintah menjalankan kebijakan defisit anggaran dan pemerintah diharapkan mampu memilih kebijakan yang tepat dalam penetapan tarif pajak pada kebijakan fiskal yang mendukung hubungan *tax-spending* Sedangkan hasil yang bertolak belakang ditunjukkan oleh penelitian Yuki et al. (2006) bahwa terdapat hubungan kausalitas satu arah dari pengeluaran pemerintah kepada penerimaan pajak di Indonesia dimana pemerintah harus menganalisis kembali kebijakan yang akan diambil agar pengeluaran lebih efektif dan efisien dalam alokasi sumber daya dan tidak menimbulkan distorsi dalam perekonomian akibat penerapan tarif pajak pada tingkat tertentu.

Tidak adanya hubungan kausalitas penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah dikarenakan penerimaan pajak dari masyarakat menjadi sumber terbesar dalam penerimaan pemerintah dan langsung menjadi dana untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah, sedangkan penerimaan pajak yang disalurkan kepada berbagai kebijakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah membutuhkan waktu yang lama dalam pengembalian sehingga tidak terdapat hubungan dari pengeluaran pemerintah kepada penerimaan pajak. Pemerintah pusat dalam RAPBN 2019 sudah melakukan berbagai pengeluaran dan kebijakan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dimana belanja pemerintah pusat difokuskan pada peningkatan sumber daya manusia yaitu anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan sesuai dengan arahan Bapak Presiden RI namun bentuk pengembalian pada masyarakat selaku penyumbang pajak membutuhkan waktu karena pengeluaran pemerintah pada sektor sumber daya manusia merupakan usaha investasi untuk masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan teori Peacock dan Wiseman yang menyatakan bahwa penerimaan pajak yang meningkat akan membuat pemerintah melakukan peningkatan pada pengeluaran guna menstabilkan perekonomian dan membangun berbagai infrastruktur penunjang. selain itu juga terdapat faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak seperti pemerataan pendapatan, jumlah penduduk, dan kepatuhan masyarakat suatu daerah dalam membayar pajak.

4.2 Kausalitas Antara Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil uji kausalitas granger menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini diketahui dari nilai probabilitas masing-masing variabel sebesar ($0.0291 < 0.05$) dan ($0.5687 > 0.05$). Maka didapat hasil bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga hipotesis yang diajukan pada penelitian ini ditolak dengan $\alpha = 0,05$ bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa selama periode penelitian tinggi atau rendahnya pengeluaran pemerintah tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia sedangkan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pengeluaran pemerintah di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dimasa lalu maupun masa sekarang.

Hasil penelitian diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Novela Hanifa dan Hasi Aimon (2019) yang menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi namun terdapat hubungan satu arah dari pertumbuhan ekonomi kepada pengeluaran pemerintah di Sumatera Barat yang mendukung hukum Wagner dimana ketika pertumbuhan meningkat akan mendorong pengeluaran pemerintah dalam upaya mencapai stabilitas dalam perekonomian. Hal ini juga dikuatkan oleh penelitian Linda (2016) dimana terdapat hubungan kausalitas satu arah dari pertumbuhan ekonomi kepada pengeluaran langsung dan tidak langsung pemerintah di provinsi Riau yang disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan barang publik sehingga pemerintah berupaya melakukan pengeluaran. Pemerintah juga harus menjalankan fungsi distribusi dalam usaha pemerataan pertumbuhan ekonomi berupa subsidi kepada masyarakat yang tidak mampu serta kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan. namun dampak dari pengeluaran tersebut

membutuhkan waktu yang lama untuk berdampak pada pertumbuhan ekonomi sehingga tidak terdapat kausalitas dari pengeluaran pemerintah kepada pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudarsono (2015) menunjukkan hasil yang berbeda dimana pada negara yang tergabung dalam OKI terdapat kausalitas satu arah dari pengeluaran pemerintah kepada pertumbuhan ekonomi di Iran, Nigeria dan Tunisia yang mendukung teori Keynes namun terdapat juga kausalitas satu arah dari pertumbuhan ekonomi kepada pengeluaran pemerintah di tujuh negara anggota OKI lainnya sehingga mendukung teori wagner, dalam penelitian ini kausalitas satu arah dari pertumbuhan ekonomi kepada pengeluaran pemerintah lebih dominan dalam sebuah perekonomian.

Tidak adanya hubungan kausalitas pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi dikarenakan dalam usaha pemerintah melakukan pengeluaran pada berbagai kebijakan masih belum tepat sehingga belum memiliki hubungan kepada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan kepada pengeluaran pemerintah karena peningkatan pada pertumbuhan ekonomi akan membawa pengaruh kepada pengeluaran pemerintah guna mengimbangi pertumbuhan ekonomi dengan berbagai kebijakan dan melakukan pembangunan berbagai infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi. Pada statistik keuangan pemerintah provinsi tahun 2013-2016 dan 2016-2019 menunjukkan fokus pengeluaran pemerintah daerah pada pengeluaran barang dan jasa serta pengeluaran pegawai dimana hal ini bersifat investasi pada sumber daya manusia dan berbagai barang dan jasa penunjang sehingga membutuhkan waktu dalam memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan hukum wagner yang melakukan penelitian di negara-negara eropa dimana dalam suatu perekonomian, ketika terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan kecenderungan peningkatan pengeluaran pemerintah guna menstabilkan perekonomian. Namun hasil penelitian tidak sesuai dengan model Rostow dan Musgrave yang menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan, negara menjadi pelopor berbagai kebijakan pembangunan guna investasi awal sehingga dalam sebuah perekonomian tergantung pada pengeluaran pemerintah.

4.3 Kausalitas Antara Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil uji kausalitas granger menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini diketahui dari nilai probabilitas masing-masing variabel sebesar ($0.8655 > 0.05$) dan ($0.7909 > 0.05$). Maka didapat hasil bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga hipotesis yang diajukan pada penelitian ini ditolak dengan $\alpha = 0,05$ bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa selama periode penelitian tinggi atau rendahnya penerimaan pajak tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ozmen et al. (2020) yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki hubungan kausalitas di Turki, hal ini terjadi karena penerimaan pajak merupakan sumber utama dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh langsung pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Hidayah et al. (2018) yang menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Barat dimana penerimaan pajak meningkat namun pengaruh dari peningkatan tersebut harus disalurkan melalui pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan meningkatkan pendapatan masyarakat namun pengaruh terhadap penerimaan pajak juga tergantung pada beberapa faktor seperti kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dan transparansi informasi perpajakan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gurdal et al. (2021) bertolak belakang dimana pada penelitian di negara yang tergabung dalam G7 terdapat kausalitas penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi yaitu di negara Jepang terdapat kausalitas satu arah dari penerimaan pajak kepada pertumbuhan ekonomi, pemerintah diminta untuk memperhatikan kebijakan perpajakan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan. Sedangkan di negara AS, Inggris dan Italia terdapat kausalitas satu arah dari pertumbuhan ekonomi kepada penerimaan pajak yang diakibatkan oleh meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat akan mendorong peningkatan penerimaan pajak yang dibayarkan masyarakat dan penyesuaian kebijakan perpajakan guna menstabilkan perekonomian.

Tidak terdapat hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh penerimaan pajak dari masyarakat tidak memberikan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi karena penerimaan pajak yang menjadi sumber utama penerimaan pemerintah harus disalurkan terlebih dahulu melalui pengeluaran pemerintah berupa kebijakan pembangunan infrastruktur dan subsidi sehingga dampak yang dirasakan membutuhkan waktu, oleh karena itu penerimaan pajak tidak memiliki pengaruh langsung pada pertumbuhan ekonomi sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan kepada penerimaan pajak karena peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh masyarakat pada daerah tertentu atau pada sektor ekonomi tertentu selain itu ada faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan kepatuhan membayar pajak. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan model yang dikemukakan Sudirman dimana penetapan tarif pajak pada tingkat tertentu akan meningkatkan penerimaan negara sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diukur dari pendapatan nasional.

5. Estimasi Panel Vector Autoregression (PVAR)

Pada tahap sebelumnya sudah dilakukan uji kointegrasi dan menunjukkan hasil tidak terdapat kointegrasi pada data variabel sehingga estimasi akan menggunakan model PVAR. Model PVAR digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel yang diteliti yang diketahui dengan membandingkan nilai t-statistik hasil estimasi terhadap nilai t-tabelnya. Nilai t-tabel diuji dengan membandingkan t-tabel dengan t-statistik dan melihat nilai signifikan dari hasil pengolahan data yang diperoleh dengan $\alpha = 0.05$ dalam penelitian ini. Dengan $df = n-k$, n merupakan banyak data dan k merupakan jumlah variabel sehingga diperoleh $df = 132-3 = 129$, maka nilai t-tabelnya sebesar 1.65675 dengan syarat apabila nilai t-statistik sama atau besar dari nilai t-tabel maka bernilai positif.

Tabel 1.8: Hasil Estimasi Panel VAR
Vector Autoregression Estimates

	LN _{Y1}	LN _{Y2}	Y ₃
LN _{Y1} (-1)	1.062770 (0.10188) [10.4316]	0.164750 (0.10875) [1.51499]	2.962066 (3.26067) [0.90842]
LN _{Y1} (-2)	-0.442559 (0.12801) [-3.45733]	-0.108893 (0.13663) [-0.79698]	-2.873597 (4.09684) [-0.70142]
LN _{Y1} (-3)	0.342515 (0.07871) [4.35183]	-0.022365 (0.08401) [-0.26622]	0.607632 (2.51899) [0.24122]
LN _{Y2} (-1)	0.048728 (0.08247) [0.59086]	0.818485 (0.08803) [9.29812]	0.140258 (2.63942) [0.05314]
LN _{Y2} (-2)	0.046837 (0.09846)	0.102367 (0.10509)	0.656875 (3.15107)

	[0.47572]	[0.97408]	[0.20846]
LN _{Y2} (-3)	-0.051668 (0.07568) [-0.68272]	0.030480 (0.08078) [0.37732]	-1.939640 (2.42212) [-0.80080]
Y ₃ (-1)	0.001761 (0.00289) [0.60927]	0.003248 (0.00308) [1.05310]	0.269386 (0.09249) [2.91260]
Y ₃ (-2)	-2.83E-06 (0.00362) [-0.00078]	0.008454 (0.00387) [2.18491]	0.068404 (0.11601) [0.58961]
Y ₃ (-3)	0.001832 (0.00348) [0.52723]	-0.004726 (0.00371) [-1.27413]	0.007267 (0.11123) [0.06533]
C	0.182564 (0.14902) [1.22508]	0.107211 (0.15907) [0.67400]	5.919696 (4.76948) [1.24116]
R-squared	0.995632	0.989268	0.159721
Adj. R-squared	0.995310	0.988476	0.097733
Sum sq. resids	0.847807	0.965938	868.4272
S.E. equation	0.083362	0.088980	2.668006
F-statistic	3089.867	1249.535	2.576645
Log likelihood	145.8618	137.2523	-311.6361
Akaike AIC	-2.058513	-1.928065	4.873274
Schwarz SC	-1.840118	-1.709671	5.091668
Mean dependent	21.23892	15.65254	5.215833
S.D. dependent	1.217235	0.828891	2.808790
Determinant resid covariance (dof adj.)		0.000288	
Determinant resid covariance		0.000228	
Log likelihood		-8.272062	
Akaike information criterion		0.579880	
Schwarz criterion		1.235062	

Sumber : Olahan Data Eviews 9, 2021

Berdasarkan tabel 1.8 menunjukkan bahwa variabel penerimaan pajak pada lag 1 memiliki pengaruh positif terhadap dirinya sendiri dengan nilai t-statistik sebesar 10.4316, namun tidak berpengaruh positif atau negatif terhadap variabel pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Pada lag 2 variabel penerimaan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap dirinya sendiri dengan nilai t-statistik sebesar -3.45733, namun tidak memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap variabel pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Pada lag 3 variabel penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap dirinya sendiri dengan nilai t-statistik sebesar 4.35183, namun tidak memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap variabel pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi.

Variabel pengeluaran pemerintah pada lag 1 berpengaruh positif terhadap dirinya sendiri yang ditunjukkan dengan nilai t-statistik sebesar 9.29812 namun tidak memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap variabel penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi. Pada lag ke 2 dan 3, variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh positif

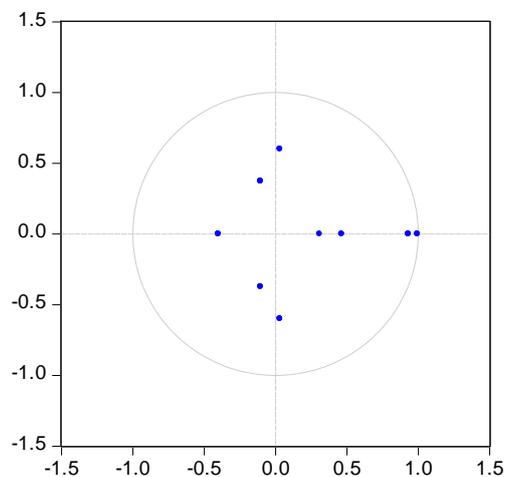
atau negatif kepada dirinya sendiri, variabel penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi.

Variabel pertumbuhan ekonomi pada lag 1 memiliki pengaruh positif terhadap dirinya sendiri yang dibuktikan dengan nilai t-statistik sebesar 2.91260, namun tidak terdapat pengaruh positif atau negatif kepada variabel penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah. Pada lag 2, variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan nilai t-statistik sebesar 2.18491, namun tidak terdapat pengaruh kepada variabel penerimaan pajak dan dirinya sendiri. Pada lag 3 tidak terdapat pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi kepada dirinya sendiri, variabel penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah.

6. Uji Stabilitas

Uji stabilitas bertujuan untuk melihat kestabilan model PVAR sebelum melakukan uji *impuls response function* (IRF) dan *variance decomposition* (VD) agar hasil analisis IRF dan VD bisa dikatakan valid. Model dikatakan stabil atau tidak apabila semua nilai Inverse Root Of AR Characteristic Polynomial berada di dalam lingkaran.

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial



Gambar 1.1 : Hasil Uji Stabilitas PVAR

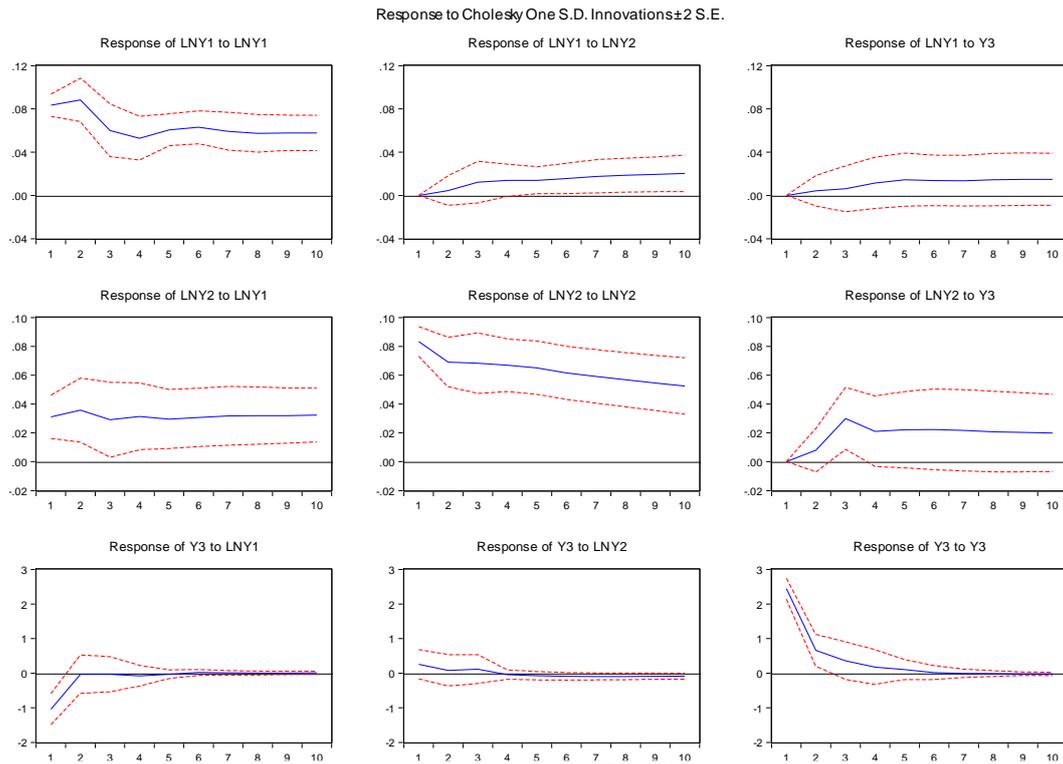
Sumber : Olahan Data Eviews 9, 2021

Pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa semua titik AR characteristic polynomial berada di dalam lingkaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa model PVAR stabil serta hasil uji IRF dan VD terbukti valid.

7. Uji Respon Variabel (Impulse Response Function)

Uji ini bertujuan untuk melacak efek perubahan suatu standar deviasi dari salah satu inovasi suatu variabel terhadap nilai sekarang dan nilai masa depan sebuah variabel didalam sebuah sistem persamaan Vector Autoregression (VAR). Penggunaan metode ini berguna untuk mengetahui respon dari suatu variabel endogen dengan variabel lainnya, karena pada sebenarnya shock suatu variabel yang ke 1 tidak hanya berpengaruh terhadap variabel itu sendiri, tetapi ditransmisikan juga kepada sebuah variabel endogen yang lainnya melalui struktur dinamis atau struktur Lag dalam persamaan VAR.

Dalam uji ini dapat diketahui respon positif atau negatif dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Dalam jangka pendek, respon tersebut biasanya cukup memberikan pengaruh yang signifikan dan cenderung berubah. Dalam jangka panjang sebaliknya respon cenderung konsisten dan terus mengecil. Hasil dari pengujian Impulse Response Function tergantung kepada ordering dari seri variabel yang digunakan dalam pengestimasiannya. Dalam penelitian ini ordering yang dipakai adalah penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Berikut hasil output eviews dari impulse response Function:



Gambar 1.2: Hasil Uji IRF

Sumber : Olahan Data Eviews 9, 2021

Dari gambar 1.2 menunjukkan IRF dari penerimaan pajak (LNY1), Pengeluaran pemerintah (LNY2) dan pertumbuhan ekonomi (Y3). Respon penerimaan pajak terhadap pengeluaran pemerintah (response of LNY1 to LNY2) menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi terhadap pengeluaran pemerintah mengalami respon yang positif. Mulai dari tahun pertama sampai tahun ke sepuluh mengalami peningkatan secara bertahap. Respon penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi (response of LNY1 to Y3) mengalami respon yang positif dari tahun pertama hingga tahun ke lima. Dari tahun ke lima sampai tahun ke sepuluh mengalami respon yang stabil.

Respon pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak (response of LNY2 to LNY1) mengalami respon positif. Mulai dari tahun pertama hingga tahun ke dua mengalami peningkatan dan pada tahun ke dua hingga ke tiga mengalami penurunan namun masih berada di atas garis keseimbangan, dari tahun ke tiga sampai tahun ke sepuluh cenderung stabil di atas garis keseimbangan. Respon pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi (response of LNY2 to Y3) menunjukkan respon positif dimana terjadi peningkatan dari tahun pertama hingga tahun ke tiga dan terjadi penurunan pada tahun ke empat namun masih berada di atas garis keseimbangan, mulai dari tahun ke empat hingga tahun ke sepuluh respon cenderung stabil.

Respon pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak (response of Y3 to LNY1) menunjukkan respon positif dan negatif dimana pada tahun pertama sampai ke dua terjadi respon positif dimana terdapat peningkatan menuju garis keseimbangan namun terjadi respon negatif pada tahun ke tiga hingga tahun ke lima dimana terjadi penurunan dibawah garis keseimbangan, pada tahun ke lima hingga ke sepuluh respon cenderung stabil pada garis keseimbangan. Respon pertumbuhan ekonomi terhadap pengeluaran pemerintah (respon of Y3 to LNY2) menunjukkan terjadinya penurunan menuju keseimbangan dari tahun pertama sampai tahun ke enam dan cenderung stabil pada garis keseimbangan pada tahun ke enam hingga tahun ke sepuluh.

8. Uji Kontribusi Variabel (*Variance Decomposition*)

Variance Decomposition (VD) digunakan untuk menjelaskan proporsi pergerakan satu variabel akibat oleh shock variabel itu sendiri terhadap dampaknya pada pergerakan lain

secara berurutan. Variance Decomposition menjelaskan variabel mana yang shocknya berperan dalam menjelaskan perubahan suatu variabel. Dengan demikian, dapat diketahui seberapa penting variabel tersebut mempengaruhi variabel lainnya. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh shock suatu variabel dapat dilihat melalui nilai dekomposisi dimana jika semakin tinggi maka semakin penting shock dari variabel tersebut. Berikut hasil uji variance decomposition :

Tabel 1.9: Hasil Uji Variance Decomposition

Variance Decomposition of LNY1:				
Period	S.E.	LNy1	LNy2	Y3
		100.000		0.00000
1	0.083362	0	0.000000	0
2	0.121577	99.73675	0.138106	0.125145
3	0.136298	98.78648	0.913039	0.30047
4	0.147301	97.45592	1.674453	0.86962
5	0.160574	96.28943	2.157320	1.553247
6	0.173737	95.38694	2.654098	1.958961
7	0.184926	94.48353	3.248725	2.267748
8	0.195052	93.58063	3.833256	2.586110
9	0.204902	92.75485	4.369968	2.875177
10	0.214384	91.99633	4.891528	3.112145

Variance Decomposition of LNY2:				
Period	S.E.	LNy1	LNy2	Y3
				0.00000
1	0.088980	12.22297	87.77703	0
2	0.118467	16.03457	83.51679	0.44863
3	0.142966	15.14312	80.14815	4.708738
4	0.162292	15.49361	79.16540	5.340984
5	0.178743	15.51142	78.54470	5.943881
6	0.192812	15.85129	77.69663	6.452089
7	0.205319	16.37518	76.81426	6.810557
8	0.216421	16.91706	76.03106	7.051872
9	0.226387	17.44816	75.29934	7.252499
10	0.235452	18.01273	74.57084	7.416421

Variance Decomposition of Y3:				
Period	S.E.	LNy1	LNy2	Y3
1	2.668006	15.23360	0.942031	83.82437
2	2.749318	14.35715	0.974901	84.66795
3	2.775225	14.10342	1.136003	84.76058
4	2.782091	14.10833	1.155929	84.73574
5	2.785152	14.08992	1.224432	84.68565
6	2.786807	14.07779	1.334292	84.58792

7	2.788405	14.06282	1.445930	84.49125
8	2.790039	14.04643	1.558152	84.39542
				84.3062
9	2.791586	14.03121	1.662529	6
10	2.793020	14.01758	1.757237	84.22518

Cholesky
Ordering:
LNY1 LNY2
Y3

Sumber : Olahan Data Eviews 9, 2021

Dari tabel 1.9 menjelaskan bahwa variance decomposition variabel penerimaan pajak pada periode pertama perkiraan error variance seluruhnya 100% dijelaskan oleh variabel penerimaan pajak itu sendiri sehingga tingkat probabilitas penerimaan pajak dipengaruhi tinggi oleh dirinya sendiri dibanding shock yang diberikan oleh variabel pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada periode ke dua hingga ke sepuluh, perubahan yang diakibatkan oleh shock variabel pengeluaran pemerintah lebih besar dari pada variabel pertumbuhan ekonomi.

Variance decomposition dari variabel pengeluaran pemerintah pada periode pertama sampai ke sepuluh mendapat perubahan besar akibat shock dari variabel pengeluaran pajak itu sendiri kemudian shock dari variabel penerimaan pajak lebih memberikan perubahan terhadap variabel pengeluaran pemerintah dari pada variabel pertumbuhan ekonomi selama sepuluh periode waktu.

Variance decomposition dari variabel pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan besar akibat shock dari variabel pertumbuhan ekonomi sendiri selama sepuluh periode waktu, kemudian shock yang diberikan variabel penerimaan pajak lebih besar memberikan perubahan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi dari pada shock yang diberikan variabel pengeluaran pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji kausalitas *granger* dengan menggunakan model PVAR dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kausalitas satu arah dari penerimaan pajak kepada pengeluaran pemerintah di Indonesia dengan probabilitas ($0.0880 > 0.05$) dan ($0.0378 < 0.05$). Dimana hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Peacock dan Wiseman tentang adanya pola hubungan dari penerimaan pajak kepada pengeluaran pemerintah dimana dana yang dihimpun dari masyarakat langsung menjadi dana yang bisa digunakan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui pengeluaran pemerintah, tidak adanya hubungan balik dari pengeluaran pemerintah kepada penerimaan pajak dikarenakan pemerintah dalam melakukan pengeluaran membutuhkan waktu yang lama dalam memberikan dampak pengembalian kepada masyarakat selaku pemberi pajak.

Terdapat kausalitas satu arah dari pertumbuhan ekonomi kepada pengeluaran pemerintah di Indonesia dengan probabilitas ($0.0291 < 0.05$) dan ($0.5687 > 0.05$). Hal ini sesuai dengan hukum Wagner dimana adanya pertumbuhan ekonomi di suatu negara akan memaksa pemerintah melakukan pengeluaran guna membangun infrastruktur penunjang dan berbagai subsidi guna menstabilkan perekonomian, tidak adanya hubungan balik dari pengeluaran pemerintah kepada pertumbuhan ekonomi karena pemerintah membutuhkan waktu dalam menjalankan berbagai kegiatan pendukung pertumbuhan ekonomi.

Pada hubungan variabel penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi tidak terdapat hubungan kausalitas dengan probabilitas ($0.8655 > 0.05$) dan ($0.7909 > 0.05$). Hal ini terjadi karena penerimaan pajak tidak dapat berpengaruh langsung kepada pertumbuhan ekonomi dimana penerimaan pajak harus menjadi pengeluaran pemerintah dalam berbagai kebijakan guna mendukung pertumbuhan ekonomi sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh langsung kepada penerimaan pajak karena adanya ketimpangan pendapatan yang mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan di daerah tertentu.

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian di atas, maka Peneliti menyarankan Pemerintah perlu merumuskan peraturan yang lebih ketat, memperhatikan penegakan peraturan dan transparansi informasi dalam pemungutan pajak daerah guna meningkatkan penerimaan pajak yang menjadi sumber terbesar penyumbang dana untuk pengeluaran pemerintah dalam menjalankan berbagai kebijakan, menghindari penggelapan pajak dan *free rider* dalam masyarakat; Pemerintah juga perlu memilih dan mengawasi kebijakan mana yang perlu dilaksanakan dalam penggunaan pengeluaran pemerintah sehingga kebijakan yang dipilih akan membawa dampak besar bagi perekonomian dan masyarakat, tidak merugikan pemerintah akibat pengeluaran yang tidak tepat dan tidak terjadi tindak penyelewengan dana pengeluaran yang sudah ditetapkan; Pemerintah perlu melakukan pengeluaran guna membangun berbagai infrastruktur potensial yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi pada daerah yang masih memiliki laju PDRB rendah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penerimaan pajak daerah dari masyarakat dan adanya pengeluaran pemerintah dalam membangun infrastruktur potensial akan meningkatkan penerimaan pajak dari berbagai unit usaha yang mengikuti pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Bank, W. (2021). *Overview Indonesia*. Worldbank.Org. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview>
- Elvianti, R. (2017). Hubungan Kausalitas Antara Penerimaan Pajak Dan Pengeluaran Negara Di Indonesia Periode 2000-2015. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(1), 31–39. <https://doi.org/10.24123/jeb.v22i1.1644>
- Gurdal, T., Aydin, M., & Inal, V. (2021). The relationship between tax revenue, government expenditure, and economic growth in G7 countries: new evidence from time and frequency domain approaches. In *Economic Change and Restructuring* (Vol. 54, Issue 2). Springer US. <https://doi.org/10.1007/s10644-020-09280-x>
- Hidayah, F., Azhar, Z., & Zaini P, D. (2018). *ANALISIS KAUSALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI, INFRASTRUKTUR DAN PENERIMAAN PAJAK DI PROVINSI SUMATERA BARAT*. 1, 586–595.
- I wayan Sudirman. (2011). *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal* (1st ed.). Kencana.
- Jaka Sriyana. (2009). A Causality Relationship Between Tax Revenue and Government Expenditure In Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 1(2), 93–101. <https://doi.org/10.20885/ejem.v1i2.2275>
- Jhingan, M. L. (2016). *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan* (16th ed.). Rajawali Pers.
- Linda, R. (2016). *KAUSALITAS DAN KOINTEGRASI ANTARA PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KURUN WAKTU 1983 -2014*. 1–17, 17.
- Maganya, M. H. (2020). Tax revenue and economic growth in developing country: an autoregressive distribution lags approach. *Central European Economic Journal*, 7(54), 205–217. <https://doi.org/10.2478/ceej-2020-0018>
- Mangkoesobroto, G. (2001). *Ekonomi Publik* (3rd ed.). BPFE-Yogyakarta.
- Novela Hanifa, A. H. (2019). Analisis Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Dan Kualitas Sumberdaya Manusia Di Provinsi Sumatera Barat. *Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 97–110(3), 14.
- Ozmen, I., Can Ozcan, C., & Gerceker, M. (2020). *Revisiting the Causality Between Tax Revenue and Economic Growth in Turkey: A Bootstrap Rolling-Window Approach*. <https://doi.org/10.33422/2nd.icabme.2019.12.879>
- Sudarsono, H. (2015). the Relationship Between Economic Growth and Government Spending: a Case Study of Oic Countries. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 11(2), 149. <https://doi.org/10.23917/jep.v11i2.322>
- Yuki, B. S., Ganna, A., Mahasiswa, S., Ekonomi, F., & Gadjah, U. (2006). *Kausalitas Pengeluaran Pemerintah Dan Penerimaan Pajak Indonesia 1970 – 2002*. 21(2), 186–192.

